

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH PENDAMPING DALAM PENDIDIKAN ANAK-ANAK KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI DESA CILUNCAT KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG

DOI: <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v7i2.1616>

Sherlyna Dwineu Asiyah¹

Politeknik Kesejahteraan Sosial

Bandung, Indonesia

sherlynadwineuasayah@gmail.com

Decky Irianti²

Politeknik Kesejahteraan Sosial

Bandung, Indonesia

deckybekti@gmail.com

Rosilawati³

Politeknik Kesejahteraan Sosial

Bandung, Indonesia

rosilawati.stks@gmail.com

Journal History

Received: 20 Agustus 2025

Accepted: 24 December 2025

Published: 30 December 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) by facilitators in supporting the education of children from Beneficiary Families (KPM) in Ciluncat Village using a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving 15 informants, including PKH facilitators, school operators, KPM mothers, and beneficiary children. The analysis is based on four aspects of George C. Edward III's policy implementation theory: communication, resources, disposition, and bureaucracy. The findings indicate that the program implementation has been fairly effective, as shown by active communication, positive facilitator attitudes, and structured operational procedures. However, several challenges remain, including uneven information dissemination, limited facilities and training for facilitators, lack of parental support for children's education, and slow bureaucratic processes. The needs analysis highlights the importance of improving facilitator capacity, enhancing communication strategies, providing continuous education for parents, and accelerating reporting mechanisms. By optimizing both formal and informal resources, the implementation of PKH in the education sector can be further strengthened to ensure the sustainability of education for children from beneficiary families.

KEYWORDS:

Family Hope Program, PKH facilitators, formal education children.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pendamping dalam pendidikan anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Ciluncat dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 15 informan yang terdiri dari pendamping PKH, operator sekolah, ibu-ibu KPM, dan anak-anak penerima manfaat. Penelitian ini dianalisis menggunakan empat aspek menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup baik, ditandai dengan komunikasi yang aktif, sikap pendamping yang positif, serta penerapan prosedur operasional yang terstruktur. Namun, masih terdapat kendala seperti penyampaian informasi yang belum merata, keterbatasan fasilitas dan pelatihan bagi pendamping, sikap sebagian orang tua yang kurang mendukung pendidikan anak, serta proses birokrasi yang cenderung lambat. Analisis kebutuhan menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas pendamping, strategi penyampaian informasi yang lebih efektif, edukasi orang tua secara berkelanjutan, serta percepatan jalur pelaporan. Dengan memaksimalkan sumber daya formal maupun informal secara seimbang, diharapkan implementasi PKH di bidang pendidikan dapat

semakin optimal dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak KPM.

KATA KUNCI:

Program Keluarga Harapan, pendamping PKH, pendidikan formal anak.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan di mana tiga hal pokok terpenuhi, masalah sosial tertangani secara efektif, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, dan kesempatan untuk mengakses berbagai peluang sosial terbuka seluas-luasnya (Midgley dalam Lamber et al., 2019). Selain itu, W. A. Friedlander (1961) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai sistem terorganisir dari pelayanan dan lembaga sosial yang mendukung individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup memadai dan membangun relasi sosial yang memperluas kemampuan mereka, sesuai kebutuhan keluarga dan masyarakat. Selain itu, (Friedlander, 1961) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai sistem terorganisir dari pelayanan dan lembaga sosial yang mendukung individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup memadai dan membangun relasi sosial yang memperluas kemampuan mereka, sesuai kebutuhan keluarga dan masyarakat. Secara konsep, kesejahteraan memiliki banyak bentuk namun, pada intinya berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang layak, aman, dan bermartabat bagi setiap orang. Sayangnya di dunia ini masih ada beberapa negara belum bisa dikatakan sejahtera dikarenakan kemiskinan. Ada strategi yang dilakukan pemerintah negara dalam memberantas kemiskinan, seperti penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha (Karlsson dalam Ala, 1981). Dalam penelitian ini, untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial, suatu negara biasanya menetapkan kebijakan atau menyelenggarakan program bantuan. Indonesia di antaranya, meluncurkan berbagai kebijakan dan program sebagai upaya mengurangi kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satunya yaitu, Program Keluarga Harapan atau yang disingkat (PKH) adalah program bantuan ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan, yang namanya tercatat dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (Sugiarto, 2024). Diresmikan pada tahun 2007 oleh kementerian sosial, PKH berkonsep *Conditional Cash Transfer* (CCT). Merupakan bantuan sosial berbentuk uang tunai dengan ketentuan penerima harus memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu (Larasati & Jannah, 2022). Dengan tujuan utama menurunkan angka kemiskinan dan memutus rantainya, meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta mendorong perubahan perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan pada kelompok masyarakat termiskin (Dirjen Anggaran Kemenkeu, 2015:6). Adapun elemen penerima manfaat PKH mengarah pada rumah tangga miskin dengan kriteria ibu hamil, balita, anak sekolah, disabilitas dan lansia yang diberikan besaran bantuan berbeda-beda tergantung komponen yang sesuai dengan penerima manfaat (Hamel, et al., 2024). Lebih lanjut menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 penerima bantuan PKH ini nantinya didampingi oleh pendamping yang memiliki tugas untuk memantau dan memonitor agar dana bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Selain itu pada buku kerja pendamping PKH tahun 2013 mereka juga memiliki peran strategis dalam mendata, memantau, mengedukasi, serta memberikan pengarahannya kepada para penerima manfaat, sehingga penggunaan dana dapat memberikan dampak positif nyata bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ciluncat, yang dipilih sebagai lokus penelitian karena menunjukkan karakteristik implementasi PKH yang cukup representatif. Desa Ciluncat memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang relatif besar, yaitu sebanyak 254 KPM, dengan komponen pendidikan sebagai komponen dominan dalam pelaksanaannya. Kondisi ini menjadikan Desa Ciluncat relevan untuk dikaji dalam melihat peran pendamping PKH serta sebaran penerima manfaat pada sektor pendidikan. Berdasarkan data rincian penerima PKH komponen pendidikan di Desa Ciluncat tahun 2025, tercatat bahwa jumlah total penerima manfaat (PM) anak sekolah adalah sebanyak 176 anak. Rincian tersebut mencakup tiga jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Jumlah penerima di jenjang SD sebanyak 78 anak, jenjang SMP sebanyak 51 anak, dan jenjang SMA sebanyak 47 anak di 14 RW. Data ini menegaskan bahwa manfaat PKH di Desa Ciluncat menjangkau beragam jenjang pendidikan dan memberikan dukungan nyata bagi keberlangsungan sekolah anak-anak dari keluarga penerima manfaat.

Tentunya aspek ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian terdahulu yang telah meneliti PKH dalam bidang pendidikan anak. (Neonnufa, 2021) menemukan bahwa PKH meringankan beban ekonomi keluarga dan memotivasi anak untuk tetap bersekolah melalui bantuan rutin yang digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Penelitian (Samiruddin et al., 2022) menguatkan temuan ini dengan menunjukkan peran optimal pendamping dalam memantau kehadiran sekolah dan memastikan dana dimanfaatkan untuk pendidikan. Sementara itu, (Kaisar & Rahmah, 2024) menyoroti peran pendamping secara komprehensif mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan, di mana dalam bidang pendidikan pendamping bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan jembatan antara keluarga miskin dan akses

pendidikan yang layak, sehingga mampu meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan serta mendorong anak untuk terus bersekolah.

Temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak dari keluarga penerima manfaat. Namun, hasil pengamatan lapangan di Desa Ciluncat memperlihatkan bahwa implementasi PKH masih menghadapi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan keterangan pendamping PKH, tercatat sebanyak 18 anak penerima manfaat yang telah putus sekolah maupun berada dalam kondisi berisiko putus sekolah. Pendamping juga menyampaikan bahwa kondisi ini berbeda dengan desa lain yang sebelumnya pernah menjadi wilayah dampingan, di mana partisipasi sekolah anak penerima manfaat relatif lebih baik dan permasalahan yang muncul umumnya terbatas pada keterlambatan pembayaran SPP, bukan putus sekolah.

Sementara di Desa Ciluncat lebih banyak faktor terjadi karena anak terlalu malas bersekolah dan orang tua yang kurang peduli terhadap pendidikan. Namun, temuan di Desa Ciluncat ditemukan juga bahwa upaya untuk mencegah anak putus sekolah belum dilakukan secara menyeluruh. Pendamping lebih banyak fokus pada bantuan administratif, tetapi untuk anak-anak yang sudah menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti sekolah, belum ada pendekatan dini atau tindakan khusus dari pendamping. Aspek pencegahan ini belum banyak menjadi fokus kajian dalam penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji secara spesifik bagaimana sebenarnya pendamping PKH menjalankan peran tersebut di Desa Ciluncat dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari (Edward III dalam Setyawan et al., 2021) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan birokrasi.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya, penting untuk meneliti lebih lanjut pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pendamping dalam mendukung pendidikan anak penerima manfaat di Desa Ciluncat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran pendamping PKH dijalankan dalam mendukung pendidikan anak dengan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Data yang dihimpun dari pendamping PKH, keluarga penerima manfaat, anak KPM, serta pihak sekolah dianalisis untuk melihat bagaimana peran pendamping dijalankan dalam empat aspek utama implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi/sikap, dan birokrasi. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pendamping dalam Pendidikan Anak Penerima Manfaat di Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung.”

LITERATUR

Kajian literatur memberikan landasan teoritis dan empiris dalam bantuan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pendamping dalam Pendidikan Anak Penerima Manfaat:

1. Konsep Cash Conditional Transfer (CCT)
Transfer tunai bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT) adalah pemberian uang secara reguler kepada rumah tangga miskin dengan syarat tertentu, seperti penggunaan layanan kesehatan, konsumsi makanan dan suplemen nutrisi, serta pendaftaran dan kehadiran anak-anak dan remaja di sekolah (Shibuya .K dalam Carmo et al., 2017). CCT dipandang sebagai strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan jangka pendek (*alleviation*) sekaligus meningkatkan kapasitas manusia (*promotion*) melalui pemenuhan kewajiban yang mensyaratkan perilaku tertentu (Rawlings & Rubio, 2005). Dengan mewajibkan akses pendidikan dan kesehatan, program ini diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui investasi pada sumber daya manusia sejak usia dini.
2. PKH sebagai Implementasi CCT di Indonesia
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan implementasi CCT di Indonesia, yang menysasar keluarga miskin dan rentan miskin. Bantuan ini diberikan jika keluarga tersebut memenuhi syarat dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Kemensos RI, 2021). Adapun Tujuan Program Keluarga Harapan atau PKH menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sebagai berikut: (1) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. (2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. (3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. (4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan (5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa aspek utama yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap/Disposisi dan Birokrasi (Edward III dalam Siregar, 2022). Dalam konteks ini, implementasi merujuk kepada peran pendamping PKH sebagai objek utama yang diamati. Karena Pendamping menjadi aktor kunci dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebagai fasilitator, wakil masyarakat dengan menyampaikan aspirasi atau kebutuhan warga, dan pengelola informasi teknis seperti mengurus data dan laporan (Ayuh & Yuliani, 2020). Melalui mekanisme ini, PKH tidak hanya

- memberikan dampak jangka pendek berupa pengurangan beban pengeluaran, tetapi juga berkontribusi jangka panjang melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi anak-anak penerima manfaat (Murah dalam Rizqi, 2022).
3. Pendidikan Anak
Dalam pelaksanaan PKH menggunakan sistem CCT, pendidikan anak menjadi salah satu kondisi utama yang harus dipenuhi keluarga penerima manfaat agar bantuan berlanjut. Pendidikan formal, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Sementara Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Republik Indonesia, 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam indeks Bantuan PKH tahun 2024, anak-anak dari keluarga penerima bantuan yang termasuk komponen pendidikan harus terdaftar dan aktif mengikuti sekolah SD, SMP, dan SMA/ sederajat. Kondisi ini menekankan bahwa pemenuhan kewajiban pendidikan bukan sekadar syarat administratif, tetapi juga cara strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencegah putus sekolah, hal ini sejalan dengan perspektif internasional seperti UNICEF dalam Convention on the Rights of the Child (1989) menyatakan bahwa anak adalah individu berusia di bawah 18 tahun, dan masa kanak-kanak merupakan periode krusial yang membentuk perkembangan kognitif, sosial, serta pengendalian diri maka pengalaman pendidikan dan lingkungan yang diterima anak sejak dini akan sangat memengaruhi kualitas perkembangan mereka di masa mendatang.
 4. Studi Empiris Terkait Program Implementasi PKH oleh pendamping dalam pendidikan anak.
Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan kualitas program PKH. Penelitian yang dilakukan oleh (Neonnufa, 2021) di Desa Sone, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara menganalisis tentang pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pendidikan anak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program ini berhasil membantu meringankan beban ekonomi keluarga miskin serta mampu meningkatkan motivasi anak-anak untuk tetap bersekolah. Dengan adanya bantuan rutin dari pemerintah, anak-anak KPM dapat memenuhi kebutuhan pendidikan mereka, seperti membeli perlengkapan sekolah atau membayar biaya lainnya. Selanjutnya, penelitian oleh (Samiruddin et al., 2022) di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, juga memperkuat temuan sebelumnya. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa implementasi PKH sudah sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan pemerintah. Pendamping PKH menjalankan peran secara optimal, mulai dari memantau kehadiran anak-anak di sekolah hingga memastikan bahwa dana yang diterima digunakan untuk kepentingan pendidikan. Keluarga penerima manfaat juga terlihat memanfaatkan dana tersebut secara tepat, terutama dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka. Kemudian, studi terbaru dilakukan oleh (Kaisar & Rahmah, 2024) di Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Penelitian ini menyoroti peran pendamping PKH secara lebih komprehensif, mencakup empat aspek utama, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan. Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai pemantau, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat melalui pendekatan partisipatif. Dalam aspek pendidikan, pendamping bertindak sebagai jembatan antara keluarga miskin dan akses terhadap pendidikan yang layak, dengan pendekatan yang bersifat motivasional, edukatif, dan solutif. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan serta mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah. Hasil studi-studi ini menegaskan bahwa keberhasilan PKH sebagai CCT sangat bergantung pada kualitas implementasi dan peran aktif pendamping dalam pemenuhan conditionality pendidikan.
 5. Revalansi Teoritis dan Konteks Lokal
Berdasarkan lima konsep diatas penelitian ini Penelitian ini dilakukan di Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung, yang memiliki sekitar 19.030 penduduk dan terdiri dari empat dusun dengan dinamika berbeda. Desa ini dipilih karena terdapat 254 KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dengan jumlah penerima anak sekolah yang paling tinggi dibandingkan komponen lainnya. Kondisi ini menjadikan desa tersebut representatif untuk mengkaji bagaimana pendidikan sebagai conditionality dijalankan melalui PKH, serta sejauh mana pendamping memastikan pemenuhan kewajiban pendidikan dan memungkinkan analisis mendalam untuk memahami bagaimana PKH dijalankan di desa tersebut dan sejauh mana program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas serta keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga penerima.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2018:213), metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan ini menekankan makna daripada generalisasi dan bertujuan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang subjek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji secara rinci implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pendamping dalam mendukung pendidikan anak-anak keluarga penerima manfaat (KPM). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 15 orang, terdiri dari 1 pendamping PKH, 6 ibu penerima manfaat, 6 anak KPM, dan 2 operator sekolah. Pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan PKH pada aspek pendidikan anak. Pemeriksaan keabsahan data mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh (Guba, 1985), yang meliputi, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Uji Kepercayaan dilakukan dengan meningkatkan ketekunan serta melalui triangulasi teknik dan waktu untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian. Uji keteralihan dilakukan agar hasil penelitian disusun dengan penjelasan yang rinci, jelas, teratur, dan dapat dipercaya agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah oleh pembaca. Uji kebergantungan dilakukan pemeriksaan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengumpulkan dan memahami data, agar data yang diperoleh tetap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan Uji kepastian dilaksanakan dengan uji objektivitas agar hasilnya lebih dapat dipercaya. dengan memeriksa kembali data, informasi, dan cara peneliti memahami serta menjelaskan temuan di lapangan, khususnya terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pendamping dalam pendidikan formal anak KPM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Aspek Komunikasi

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada pelaksanaan implementasi Edward III di aspek komunikasi antara pendamping, pihak sekolah, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbukti sangat strategis dan efektif. (Khairullah & Nasution, 2024) menyoroti bahwa komunikasi interpersonal pendamping melalui dialog tatap muka serta penggunaan WhatsApp dan kunjungan langsung mampu memengaruhi perubahan perilaku masyarakat penerima manfaat secara signifikan. Selaras dengan itu, penelitian (Annisa & Dwivayani Annisa & Dwivayani, 2024) menegaskan bahwa gaya komunikasi pendamping yang terbuka, suportif, empatik, dan mencerminkan kesamaan, sangat memudahkan penyampaian informasi kepada KPM. Komunikasi tatap muka, seperti dalam pertemuan P2K2 maupun kunjungan rumah, mendukung dua arah dialog lebih jelas sesuai (Altman & Taylor, 1973) dalam Teori Penetrasi Sosialnya, menunjukkan bahwa kombinasi komunikasi verbal dan nonverbal memperkuat kedekatan baik emosional maupun pemahaman. Selain itu, (Praratya et al., 2024) mencatat bahwa penggunaan penyuluhan, alat bantu presentasi, dan grup WhatsApp dalam strategi komunikasi pendamping sosial PKH penting untuk memperluas jangkauan informasi. Walau begitu, tantangan tetap ada. Minimnya keterlibatan guru atau kepala sekolah serta belum optimalnya penggunaan media digital untuk menjangkau KPM yang tidak hadir menjadi hambatan.

Secara keseluruhan, isi dan cara penyampaian informasi oleh pendamping melalui WhatsApp, surat, pertemuan langsung, serta penggunaan bahasa sehari-hari atau daerah terbilang konsisten dan jelas. Pendekatan fleksibel dalam penjadwalan pertemuan juga menunjukkan adaptasi yang responsif terhadap kebutuhan KPM. Untuk meningkatkan cakupan pesan, tambahan seperti ringkasan tertulis atau video singkat di grup WhatsApp dapat memastikan bahwa seluruh KPM, termasuk yang tidak hadir, tetap mendapatkan informasi yang sama dan tepat waktu.

b. Aspek Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan program, sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Menurutnya, aspek sumber daya merupakan kunci dalam efektivitas implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat berbagai kendala dalam hal sumber daya pendamping PKH, baik dari sisi jumlah, kualitas, hingga dukungan fasilitas. Dari segi staf, jumlah pendamping sebenarnya sudah memadai dan ada kerja sama tim yang baik saat melakukan verifikasi ke sekolah. Namun, kualitas dan kapasitas pendamping masih perlu ditingkatkan karena mereka hanya mendapatkan pelatihan dasar di awal penugasan dan belum pernah mendapatkan pelatihan lanjutan, padahal mereka dihadapkan pada persoalan kompleks di lapangan. Selaras dengan itu (Ningrum et al., 2025)

menemukan bahwa meski jumlah pendamping kurang memadai dan tim kerja solid, pengembangan kapasitas melalui pelatihan lanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas tugas mereka di lapangan. Selain itu (Karina & Yusuf, 2025) yang menyoroti perlunya peningkatan pelatihan dan penguatan kualitas pendamping dalam pemberdayaan masyarakat melalui PKH.

Secara informal, dan hal ini cukup efektif meningkatkan pemahaman serta motivasi keluarga penerima manfaat. Selain itu, dari aspek wewenang, secara formal pendamping telah menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman yang ada, terutama dalam verifikasi komitmen pendidikan. Namun, dalam praktiknya, pendamping seringkali mengambil inisiatif lebih jauh seperti memberikan saran tentang sekolah atau menjelaskan sistem zonasi kepada KPM. Hal ini mencerminkan adanya kepercayaan dan hubungan sosial yang kuat antara pendamping dan KPM, yang meskipun di luar tugas formal, justru memperkuat efektivitas program di lapangan. Hal ini sesuai dengan Teori hubungan pertolongan dari (Rogers, 1996) juga relevan dengan temuan ini, di mana empati, ketulusan, dan penerimaan tanpa syarat dari seorang pendamping menjadi faktor penting yang dapat memotivasi perubahan perilaku positif pada penerima manfaat. Dalam konteks PKH, pendamping yang mampu menempatkan dirinya sebagai mitra dan bukan sekadar pengawas akan membangun rasa percaya, sehingga keluarga penerima lebih terbuka menerima saran.

Sementara itu, dari sisi fasilitas, pendamping mengaku tidak mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti biaya operasional cetak dokumen atau transportasi. Akibatnya, mereka harus menggunakan dana pribadi untuk menyelesaikan tugas, yang tentunya menjadi beban tersendiri. Meskipun begitu, dedikasi pendamping tetap tinggi, bahkan diakui oleh KPM dan anak-anak mereka sebagai sosok yang sangat membantu dalam proses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meski terbatas secara sumber daya, kehadiran dan peran aktif pendamping tetap memberi dampak positif yang besar bagi keberlanjutan pendidikan anak-anak penerima bantuan. Seperti perspektif teori modal sosial yang dikemukakan oleh (Putnam, 2000), hubungan kepercayaan dan jaringan sosial yang dimiliki pendamping dapat menjadi modal non-material yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi program. Keberadaan modal sosial ini mampu menutup sebagian kekurangan yang timbul akibat keterbatasan sumber daya finansial dan logistik.

c. Aspek sikap/disposisi

Penelitian memaparkan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), dalam teori implementasi Edward III, sikap atau disposisi para pelaksana seperti pendamping, operator sekolah, dan KPM sangat menentukan keberhasilan program. Pendamping tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap pendidikan anak-anak KPM dengan memberikan motivasi dan melakukan pemantauan secara aktif. Ini sejalan dengan temuan (Zahrn, 2025), yang menunjukkan bahwa PKH mampu meningkatkan partisipasi sekolah dan akses layanan kesehatan pada keluarga penerima, terutama bila didukung oleh koordinasi yang baik antar sektor dan kelembagaan lebih luas. Operator sekolah juga menunjukkan disposisi positif, terbukti dari kesediaan mereka membantu pendamping meski menghadapi kendala teknis seperti perubahan data mendadak. Seperti (Pangestu & Fedryansyah, 2023), di mana PKH terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan anak KPM serta prestasi akademik mereka, sebagai cerminan sinergi antara teknologi, pendidikan, dan dukungan komunitas.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dari sebagian orang tua KPM yang masih belum memprioritaskan pendidikan anak dan lebih memilih anaknya untuk bekerja membantu keluarga. Meski begitu, tidak sedikit pula orang tua yang mendukung penuh pendidikan dan aktif menjalin komunikasi dengan pendamping, bahkan meneruskan semangat itu kepada anak-anak mereka. Ini seperti (Nur et al., 2024) Yang menyoroti bahwa dukungan sosial dari lingkungan, termasuk masyarakat sekitar merupakan faktor penting dalam membentuk sikap positif keluarga terhadap pendidikan, yang secara jelas meningkatkan motivasi anak untuk bersekolah secara teratur. Keberadaan lingkungan yang suportif ini memperkuat semangat belajar anak-anak KPM, yang merasa diperhatikan dan didukung oleh orang dewasa di sekitar mereka. Hal ini sejalan dengan Teori Ekologi Perkembangan (Bronfenbrenner, 1979), yang menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara individu dengan berbagai sistem lingkungan di sekitarnya, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Lingkungan terdekat yang memberikan dukungan positif dapat meningkatkan motivasi belajar, rasa percaya diri, dan partisipasi anak dalam pendidikan secara berkelanjutan.

d. Aspek Birokrasi

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), menurut teori Edward III dalam aspek birokrasi melalui penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP) berjalan dengan cukup baik, terutama dalam mendukung pendidikan anak-anak KPM. Pendamping PKH tidak hanya bertindak sebagai penyalur bantuan, tetapi menjelma sebagai penghubung aktif antara KPM, sekolah, dan instansi pemerintahan desa hingga kecamatan. Mereka memverifikasi kehadiran, membantu administrasi, serta memastikan keakuratan data melalui koordinasi dengan operator sekolah. SOP juga dijalankan oleh pihak sekolah secara sistematis—mulai dari pengecekan data Dapodik, pembuatan surat aktif sekolah, hingga konfirmasi dengan wali kelas dan pengiriman data melalui sarana komunikasi cepat seperti WhatsApp. Sebagai tambahan penting, orang

tua KPM turut aktif dalam alur SOP dengan melaporkan dokumen, memberikan data pendidikan anak, dan menyampaikan perubahan yang terjadi. Model tata kelola seperti ini mencerminkan prinsip birokrasi ideal ala Max Weber, yang menekankan kepastian aturan, prosedur yang rutin, dan struktur formal yang efisien streamlining proses administratif di PKH, tetapi sekaligus menghindari kesewenang-wenangan (Arischa & Adnan, 2023). Hal ini selaras dengan kerangka Good Governance yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Di samping itu, melibatkan orang tua dan sekolah mencerminkan evolusi paradigma administrasi publik dari model top-down murni menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi layanan (New Public Services) untuk memastikan bahwa prosedur tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berasas nilai dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Putra et al., 2024). Di samping itu, melibatkan orang tua dan sekolah mencerminkan evolusi paradigma administrasi publik dari model top-down murni menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi layanan (New Public Services) untuk memastikan bahwa prosedur tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berasas nilai dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2000).

Selain SOP, aspek fragmentasi, pelaksanaan PKH yang melibatkan berbagai actor mulai dari pendamping, operator dan guru sekolah, kepala sekolah, petugas desa hingga koordinator kabupaten, serta orang tua dan anak menjadi contoh nyata dari model governance kolaboratif (collaborative governance) di mana berbagai stakeholder bekerja bersama secara formal dan terstruktur demi pencapaian tujuan publik yang sama (Ansell, Chris and Gash, 2008). Proses koordinasi yang berjalan cukup baik, meski menghadapi kendala seperti keterlambatan pelaporan dan permintaan data mendadak, menunjukkan adanya kerjasama antar-pihak yang kuat. Untuk memperkuat efektivitas model ini, pendekatan policy learning sangat tepat diterapkan—dengan mekanisme belajar bersama melalui forum atau review berkala, semua aktor bisa menyelaraskan pemahaman, memperbaiki prosedur, dan memperkuat kolaborasi sehingga fragmentasi tidak menjadi hambatan, melainkan justru penguatan sistem layanan pendidikan PKH (Martikalini et al., 2025).

ANALISIS MASALAH

Hasil penelitian dapat diketahui berdasarkan aspek yang diteliti. Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dibahas, peneliti menganalisis masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Tantangan dalam menyampaikan informasi

Masih ada kesulitan dalam menyampaikan informasi yang sama dan jelas lewat berbagai cara, seperti lewat WhatsApp atau surat edaran. Banyak Keluarga Penerima Manfaat lebih mengandalkan informasi disampaikan langsung atau tatap muka, dan pesan yang disampaikan melalui media lain seperti Whatsapp dan surat edaran seringkali baru dibaca saat senggang atau bahkan terlewatkan. Selain itu, karena tidak semua orang memahami informasi dengan cara yang sama, pesan yang disampaikan pendamping bisa diartikan berbeda-beda. Apalagi jika informasi diteruskan dari ibu ke anak, sering kali ada bagian yang lupa atau berubah, sehingga isi pesannya jadi tidak sama lagi.

2. Keterbatasan Fasilitas dan Dukungan Pendukung

Pendamping PKH sebenarnya memiliki semangat dan inisiatif tinggi dalam membantu KPM, termasuk dalam hal pendidikan anak. Tetapi akses terhadap pemanfaatan sumber daya mereka sangat terbatas. Tidak ada pelatihan seperti peningkatan untuk menambah keterampilan, dana operasional, dan fasilitas seperti laptop, printer, atau transportasi sering harus disediakan sendiri. Akibatnya, pendamping memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar untuk digunakan sebagai sumber daya. Situasi ini membuat kerja pendamping tidak bisa maksimal dalam menjalankan perannya. Ditambah Pendamping juga sangat bergantung pada data dari sekolah, dan kalau ada pergantian staf atau perubahan data mendadak, kerja mereka jadi terhambat. Hal ini membuat proses pendampingan tidak bisa maksimal.

3. Masih Ada Orang Tua yang Belum Mendukung Pendidikan Anak

Salah satu masalah penting lainnya adalah sikap sebagian orang tua yang belum menganggap pendidikan itu penting. Masih ada yang lebih memilih anaknya membantu di rumah atau bekerja daripada melanjutkan sekolah. Meskipun pendamping sudah berusaha menyadarkan orang tua, kalau pola pikirnya tidak berubah, anak tetap berisiko putus sekolah. Ini menjadi tantangan besar karena dukungan orang tua sangat penting agar anak bisa terus semangat belajar dan menyelesaikan pendidikannya.

4. Proses birokrasi yang memakan waktu

Pendamping PKH sebenarnya sudah sigap dalam melaporkan masalah, seperti data anak yang tidak sesuai atau bantuan yang belum cair. Namun, karena harus mengikuti banyak tahapan birokrasi, penanganan masalah sering jadi lambat. Meskipun pendamping sudah bekerja dengan cepat dan penuh tanggung jawab, proses yang berbelit ini tetap menghambat pelayanan yang seharusnya bisa langsung diterima oleh KPM.

ANALISIS KEBUTUHAN

Analisis kebutuhan merupakan hasil dari masalah yang ada pada penelitian ini digunakan analisis kebutuhan untuk memahami terkait kendala, langkah-langkah perbaikan dukungan yang sesuai yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Media Informasi yang Konsisten dan Mudah Diakses

Diperlukan metode penyampaian informasi yang lebih efektif sehingga pesan yang disampaikan kepada KPM tidak membingungkan atau berubah saat diteruskan. Media komunikasi seperti WhatsApp, surat edaran, atau pertemuan tatap muka perlu dipadukan dengan strategi komunikasi yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh KPM ibu dan anak.

2. Penguatan Kapasitas dan Sarana Kerja Pendamping

Pendamping memerlukan pelatihan seperti peningkatan kapasitas seperti mengikuti seminar atau workshop yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendamping. Selain keterampilan, perlu adanya alokasi dana operasional yang jelas misalnya untuk transportasi, pulsa/kuota, dan ATK agar pendamping tidak lagi memakai uang pribadi. Fasilitas kerja dasar seperti komputer atau laptop, printer portabel, dan akses internet stabil juga harus tersedia sehingga pendamping dapat mengolah data dan menyusun laporan tepat waktu tanpa bergantung pada pinjaman fasilitas pihak lain.

3. Edukasi dan Pendekatan Khusus untuk Mengubah Pola Pikir Orang Tua

Dalam mengatasi tantangan terkait rendahnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak, dibutuhkan upaya edukasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang lebih personal. Orang tua perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk masa depan anak, serta bagaimana sekolah dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan keterbatasan ekonomi. Kegiatan seperti diskusi kelompok, atau pertemuan orang tua KPM dengan tetangga yang sudah menjadi mantan KPM dan anaknya bisa melanjutkan Pendidikan hingga lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan bagus dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun kesadaran dan merubah pola pikir. Selain itu, pendekatan humanis dan tidak menghakimi yang perlu digunakan agar orang tua merasa dihargai dan terbuka menerima informasi baru.

4. Percepatan Proses Birokrasi dan Jalur Pelaporan yang Lebih Ringkas

Diperlukan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang lebih cepat dan efisien, agar masalah yang dilaporkan pendamping, seperti ketidaksesuaian data atau bantuan yang tertunda, bisa segera ditindaklanjuti. Diperlukan sistem pelaporan yang bisa dilakukan secara digital atau cara komunikasi langsung antar petugas dan atasan, supaya masalah bisa lebih cepat ditangani dan tidak perlu menunggu lama.

ANALISIS SUMBER

Hasil analisis masalah dan kebutuhan kemudian dipadukan dengan pemetaan sistem serta sumber daya yang tersedia pada penelitian ini. Berikut rinciannya:

1. Formal

Dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat, pendamping PKH bekerja dengan mengandalkan berbagai sumber, baik formal maupun informal. Sumber formal biasanya berasal dari lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan, seperti Dinas Sosial, Koordinator Kabupaten, pihak sekolah, dan instansi pemerintah lainnya. Sumber ini memberikan informasi resmi tentang kebijakan, pelaporan, pelatihan, serta prosedur birokrasi yang harus dijalankan oleh pendamping.

2. Informal

Di sisi lain, sumber informal juga banyak dimanfaatkan pendamping, seperti pengalaman pribadi, diskusi dengan sesama pendamping, atau bahkan informasi yang mereka cari sendiri melalui internet atau mengobrol dengan pihak terkait. Selain itu, interaksi langsung dengan KPM juga menjadi sumber informasi penting, terutama untuk memahami kondisi dan kebutuhan mereka sehari-hari. Sumber informal ini sering menjadi pegangan utama ketika pendamping harus memberikan saran atau mengambil keputusan cepat, apalagi ketika tidak ada petunjuk resmi dari atasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung pendidikan anak-anak KPM di Desa Ciluncat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan sebagian besar indikator implementasi kebijakan menurut Edward III, meskipun belum sepenuhnya optimal di seluruh aspek. Dari segi komunikasi, pendamping PKH telah mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan menjangkau berbagai pihak, meskipun masih terdapat kendala dalam hal waktu penyampaian dan efektivitas media digital. Pada aspek sumber daya, jumlah pendamping dinilai sudah mencukupi, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas, sistem informasi yang lebih baik, serta dukungan fasilitas yang memadai agar tugas di lapangan dapat dijalankan secara optimal. Sikap atau disposisi pelaksana program juga menunjukkan hasil yang positif, dengan adanya semangat, kepedulian, dan motivasi moral dari para pendamping serta dukungan emosional dari lingkungan sekitar yang turut mendorong semangat belajar anak-anak KPM. Sementara itu, dari aspek birokrasi, penerapan SOP dan koordinasi antar pihak sudah cukup terstruktur dan membantu kelancaran program, meskipun fragmentasi aktor dalam pelaksanaan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal sinkronisasi informasi dan ketepatan waktu. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi PKH di Desa Ciluncat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem dan prosedur, tetapi juga oleh kekuatan hubungan sosial, kolaborasi

lintas sektor, serta dedikasi para pelaksana yang terus berupaya mendampingi dan memotivasi KPM dalam mencapai tujuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, I., & Taylor, D. A. (1973). Social penetration: The development of interpersonal relationships. In *Social penetration: The development of interpersonal relationships*.
- Annisa, D., & Dwivayani, K. D. (2024). KOMUNIKASI INTERPERSONAL PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI. 12(2), 236–248.
- Ansell, Chris and Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice , Chris Ansell and Alison Gash. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Arischa, L. K., & Adnan, M. F. (2023). Dinamika Teori Birokrasi dan Transformasi Organisasi Publik. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 8(2), 1–15. <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik>
- Arzat Lamber, Lisbeth Lesawengen, E. K. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), hal.4.
- Ayuh, E. T., & Yuliani, H. (2020). Efektivitas Komunikasi Antar Pendamping Dan Penerima Program Keluarga Harapan.
- Bronfenbrenner. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge. *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*.
- Carmo, R., Cruz, D. S., Barroso, L., Moura, A. De, José, J., & Neto, S. (2017). Conditional cash transfers and the creation of equal opportunities of health for children in low and middle-income countries : a literature review. 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12939-017-0647-2>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021).
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Guba, L. and. (1985). Establishing Trustworthiness Naturalistic inquiry. *Purpose Meets Execution*.
- Habe, H., & Ahiruddin, A. (2017). Sistem Pendidikan Nasional. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 39–45. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>
- Kaisar, P., & Rahmah, S. (2024). PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI * Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial * Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Article Info Keyword : *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 03(01), 122–134.
- Karina, P., & Yusuf, A. (2025). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang The Role of Family Hope Program (PKH) Companions in Overcoming Poverty of Beneficiary Families (KPM) i. 5.
- Kemensos RI. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021 (Guidelines for the Implementation of the Family Hope Program 2021). In *Direktur Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jendral Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI* (Vol. 5, Issue 2, p. 7).
- Larasati, B., & Jannah, L. M. (2022). Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Indonesia. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 71–90. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Lestari, M. R. M. (2009). No Title طرق تدريس اللغة العربية. *Экономика Педагога*, 19(19), 19.
- Martikalini, C., Alfitri, Sriati, & Thamrin, M. H. (2025). Policy Learning as a Strategy to Strengthen Collaborative Governance in Public Services: Theoretical and Practical Perspectives. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 17(1), 88–109. <https://doi.org/10.15575/jpan.v17i1.45738>
- Nasution, N. A. (2024). Interpersonal Communication in Mentoring Changes in Community Behavior in The Program Keluarga Harapan (PKH) Komunikasi Interpersonal dalam Pendampingan Perubahan Perilaku Masyarakat pada Program Keluarga Harapan (PKH). 22(01), 13–22.
- Ningrum, S. R., Robandi, B., Wahyudin, U., Kamil, M., & Agiati, E. (2025). Refleksi Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan di Kabupaten Garut untuk Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan. 183–195.
- Nur, R. F., Kurniawan, I., & Hakim, A. (2024). Pengaruh Faktor Lingkungan Keluarga, Karakteristik Orang Tua dan Dukungan Sosial Masyarakat Terhadap Pada Anak Balita. *Jurnal Sehat Indonesia (JUSINDO)*, 6(02), 800–809. <https://doi.org/10.59141/jsi.v6i02.139>
- Pangestu, S. D., & Fedryansyah, M. (2023). Efektivitas Pkh Bidang Pendidikan Dalam Partisipasi Pendidikan Anak Kpm Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 137. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.39232>
- Pid, R. N. (1818). Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized.

- Praratya, A., Nulhaqim, S. A., Margana, B. B. G., & Adiansah, W. (2024). Strategi Komunikasi Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) Di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Share: Social Work Journal*, 13(2), 187–193. <https://doi.org/10.24198/share.v13i2.49895>
- Program, E., Harapan, K., & Sugiarto, E. (2024). DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES. 8(1), 1–13.
- Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone The Collapse and Revival o. *The Social Science Journal*, 39, 489–490.
- Putra, J. A. M., Permata, D., Djani, A. I. P., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2024). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 03(02), 3031–9498.
- R, A. (2016). *Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Ilmu Sosial*. 15(1), 35–52.
- Rawlings, L. B., & Rubio, G. M. (2005). *Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs Conditional Cash Transfer Programs : A New Approach*. 29–55. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkio01>
- Republik Indonesia. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014. UU Perlindungan Anak, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Rizqi, M. N. (2022). Peran Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
- Rogers, C. R. (1996). On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy: To be that self. *Contemporary Psychology*.
- Samiruddin, Ramly, A., Syaban, A., Jasrudin, Suriaman, & Rahmiati. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Bidang Pendidikan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). GEORGE EDWARD III MODEL. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*. <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i2.774>
- Wahidin Septa Zahran. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4468>
- Indeks Bantuan PKH tahun 2024. (n.d.).